

## TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BANK PAPUA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**Robinhot Sagala<sup>1\*</sup>**  
**robbinhotsagala@gmail.com**

Program Studi Ilmu Komunikasi  
Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura

### ABSTRAK

Bank sebagai perusahaan yang melayani jasa keuangan sektor perbankan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan perbankan dituntut untuk menjalankan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana salah satunya adalah transparansi dan publikasi kinerja dan permodalan perusahaan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan informasi bagi seluruh para pemangku kepentingan (*stakeholdres*). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui transparansi laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh bank Papua kepada para setiap pemangku kepentingan dalam rangka keterbukaan informasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan studi literatur terhadap laporan keuangan Bank Papua Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Papua menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Coprporate Governance*) dalam menjalankan perusahaan, dimana salah satu prinsipnya adalah transparansi. Perusahaan menyediakan informasi yang wajib disediakan, wajib disediakan serta merta, wajib disediakan setiap saat dan laporan keuangan perusahaan secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) secara *relevant, reliable, complete, timely* dan *understandble* yang telah diaudit oleh auditor independen. Perseroan juga mempublikasikan laporan keuangan melalui media komunikasi internal dan eksternal perusahaan sehingga setiap para pemangku kepentingan mengetahui informasi kinerja perusahaan.

**Kata Kunci : Transparansi keuangan, Media komunikasi, Informasi Publik.**

## A. PENDAHULUAN

Bank Papua sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana pihak ketiga (masyarakat) dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan. Sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kota, Kabupaten Papua dan Papua Barat, Bank Papua diharapkan mendukung pembangunan infrastruktur, membuat kantong-kantong pertumbuhan ekonomi baru dimana Bank Papua berperan sebagai *agent of development*, membantu perekonomian dan bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat melalui produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan lainnya. Bank Papua visi dan misi sebagai Bank Pembangunan Daerah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Tanah Papua dan Papua Barat yang berkelanjutan. Bank Papua juga bertugas mendukung pelaksanaan proyek Pemerintah Daerah terkait pembangunan ekonomi di Tanah Papua dan Papua Barat, melakukan pengembangan bisnis di wilayah *remote*, serta pengembangan teknologi perbankan *digital* yang memungkinkan perluasan jangkauan layanan kepada para nasabah.

Bank Papua sebagai perusahaan publik diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa keuangan mempunyai fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan yang dibagi atas sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Bank Papua sebagai perusahaan yang melayani jasa perbankan dituntut untuk menjalankan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana salah satunya adalah transparansi dan publikasi kinerja dan permodalan perusahaan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan informasi bagi seluruh para pemangku kepentingan (*stakeholdres*). Bank Papua sebagai perusahaan publik yang bergerak di bidang perbankan diwajibkan untuk melakukan transparansi dan publikasi kinerja dan kondisi keuangan maupun non-keuangan kepada setiap para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam era informasi saat ini, keterbukaan atau tansparansi merupakan sebuah prinsip yang harus dijalankan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Untuk menjalankan keterbukaan kepada publik, dibutuhkan Komunikasi yang efektif antara manajemen dan para

pemangku kepentingan, dimana setiap pemangku kepentingan bisa mengakses informasi yang dibutuhkan setiap saat, sehingga terjadi keseimbangan informasi. Komitmen untuk menerapkan transparansi keuangan juga dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur penerapan prinsip transparansi dan publikasi laporan keuangan akan membawa sejumlah implikasi yang baik terhadap organisasi. Transparansi informasi publik mengenai kinerja perusahaan dan laporan keuangan memberikan dampak yang positif, baik bagi perusahaan, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan juga publik. Bagi perusahaan, penerapan transparansi informasi akan mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas kinerja perusahaan. Sementara bagi publik, selain memenuhi hak untuk mengetahui informasi publik (*right to know*), keterbukaan informasi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengontrol setiap kebijakan dan langkah yang ditempuh perusahaan dan mendorong partisipasi aktif setiap pemangku kepentingan yang akan berdampak terhadap citra dan reputasi perseroan yang baik dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian terhadap Bank Papua sebagai Bank yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di perusahaan daerah di tanah Papua. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Bank Papua menjalankan transparansi perusahaan dan mampu bersaing dengan Bank umum lainnya ditengah persaingan yang ketat. Yang akan dikaji lebih spesifik dalam penelitian ini adalah transparansi laporan keuangan yang dijalankan Bank Papua dalam era keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan transparansi yang dijalankan oleh Bank Pembangunan Daerah Papua melalui berbagai saluran media komunikasi kepada para setiap pemangku kepentingan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik pada era informasi saat.

## B. TINJAUN TEORITIS

### Transparansi Informasi Publik

Konsep transparansi merupakan konsep yang mendapat perhatian pada era informasi digital saat ini. Berkembangnya konsep ini dipengaruhi oleh permasalahan yang dihadapi organisasi publik maupun swasta dan juga sejalan dengan berkembangnya konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Menurut (Pasquier & Villeneuve, 2007) serta Ball (2009) konsep keterbukaan dikaitkan dengan upaya untuk memberantas tindakan-tindakan penyimpangan baik yang dilakukan organisasi maupun secara individual seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Konsep ini disebut juga sebagai suatu aspek yang diperlukan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Keterbukaan oleh para ahli diartikan sebagai suatu konsep yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Misalnya, transparansi organisasi, transparansi akuntansi dan anggaran, transparansi bank, transparansi dokumen, dan lainnya. Transparansi menurut (Pasquier & Villeneuve, 2007) diartikan *“the opening up the internal organizational processes and decisions to third parties, wheter or not these third parties are involved in organizations”*.

Transparansi organisasi berhubungan dengan upaya organisasi untuk membuka diri baik menyangkut proses-proses internal maupun keputusan organisasi kepada pihak eksternal, terlepas apakah pihak eksternal tersebut terlibat maupun tidak terlibat dalam organisasi. (Finel & Lord, 1999) menyebutkan bahwa transparansi adalah *“Transparency as legal, political, and institutional structures that make information about the internal characteristics of a government and society available to actors both inside and outside of domestic political system. Transparency allows outsider to discern a variety of important factors including relative capabilities, risk aversion or acceptance interests, and intentions.*

Fine & Lord menerangkan bahwa transparansi dalam pemerintah merupakan suatu struktur hukum, politis dan institusional dimana pemerintah menciptakan ketersediaan informasi tentang dimana pemerintah menciptakan ketersediaan informasi tentang berbagai aspek dalam pemerintah dan masyarakat baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dengan dijalankannya transparansi, maka pihak-pihak eksternal dapat melihat berbagai factor penting dalam pemerintah baik kapasitas, keengganan maupun penerimaan, kepentingan dan tujuan – tujuan pemerintah. Dengan demikian maka

keterbukaan publik berhubungan erat dengan ketersediaan informasi yang dimiliki oleh pemerintah dapat diakses dengan mudah untuk dipergunakan secara baik.

Dalam konsep transparansi informasi menurut (Garsten & De Montoya, 2008) arus informasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menciptakan transparansi. Dengan adanya arus informasi, maka organisasi akan mengembangkan berbagai hubungan dengan masyarakat perseorangan maupun publik serta dengan dunia usaha dalam era informasi dewasa ini yang ditandai dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, maka akses publik terhadap berbagai informasi menjadi semakin dipermudah.

Konsep keterbukaan informasi ada dua konsep yang saling berhubungan yaitu konsep akses informasi dan konsep informasi itu sendiri. Konsep akses informasi menurut (Oltmann, 2009) adalah “*the presence of a robust system through which information is made available to citizens and others*”. Sedangkan akses terhadap informasi berhubungan dengan ketersediaan sebuah system, dimana informasi menjadi tersedia bagi publik dan pihak-pihak lainnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, bahwa konsep transparansi berkaitan dengan keterbukaan organisasi untuk memberikan pihak-pihak di luar organisasi dapat mengetahui proses-proses yang terjadi di dalam organisasi. Untuk mewujudkan transparansi menurut (Finel & Lord, 1999) dilaksanakan melalui konsep keterbukaan informasi apakah dalam bentuk siaran pers, dengar pendapat. Keterbukaan informasi oleh para ahli dikaitkan dengan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi. Keterbukaan informasi dalam organisasi sering dipakai dengan menggunakan istilah yang beragam. (Oltmann, 2009) mengidentifikasi beberapa istilah yang digunakan diantaranya “*free dissemination of information, access to information and knowledge resources, freedom of information, freedom of access to information, right to have access to all expression of knowledge, creativity, and intellectual activity, freedom of information access, information disclosure, right to know*”.

**Tabel 1.1**  
**Daftar kebijakan yang mengatur**  
**penerapan transparansi**

<b>Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Pasal</b>
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 9:(2c) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik adalah informasi mengenai laporan keuangan
Peraturan Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank	Pasal :1 dan 2 Bank wajib menyusun dan mengumumkan dan menyampikan laporan publikasi keuangan dan kinerja keuangan bulanan, triwulan, tahunan.

Sumber : Diolah peneliti

### **Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Bank adalah laporan keuangan yang disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan bank yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan bank harus memenuhi syarat mutu dan sesuai dengan akuntansi perbankan. Menurut (Jumingan, 2006) bahwa “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang

berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah manajemen, pemilik, kreditur, investor, karyawan dan lembaga pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan menurut Islahuzzaman (2012:35) bahwa: Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan tentang posisi keuangan perusahaan pada periode yang berakhir pada tanggal tertentu, yang terdiri atas neraca, daftar laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya. Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah hasil proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis yang digunakan sebagai media komunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk menilai kondisi perusahaan dan juga untuk mengambil keputusan bisnis bagi para pemangku kepentingan. Ada tiga jenis laporan keuangan bank, yaitu :

- a. Laporan Keuangan Bulanan
- b. Laporan Keuangan Triwulan
- c. Laporan keuangan Tahunan

(Mursyidi, 2010) mengemukakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari karakteristik kualitatifnya dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah format dan prosedur penyusunan dan penyajian

laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. SAK berisi pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI). Standar Akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global, yakni International Financial Reporting Standards (IFRS). Terdapat empat karakteristik kualitatif karakteristik laporan keuangan sesuai dengan SAK, yaitu : dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevant*), kredibel (*reliability*) dan dapat dibandingkan (*comparability*). Karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pentingnya karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan supaya informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan.

a) *Relevant* (Relevan)

Faktor ini sangat dikaitkan dengan informasi akuntansi harus bisa bermanfaat secara langsung bagi pengguna informasi akutansinya. Dikarenakan informasi ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk membuat

perencanaan, perkiraan di masa yang akan datang dan evaluasi terhadap kualitas informasi akuntansi di masa lalu. Selain itu dapat memberikan pemahaman yang baru terhadap pengguna kualitas informasi akuntansi sehingga laporan yang hanya bersifat sementara, dan selanjutnya tidak relevan harus dihentikan pembuatannya. Kualitas informasi akuntansi harus memiliki karakteristik yang relevan, akurat dan tepat waktu.

b) *Reliable* (Terpercaya)

Kualitas informasi akuntansi haruslah akurat dan valid sehingga informasi akuntansi tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Bilamana ada kesalahan seperti neraca saldonya tidak seimbang haruslah diperbaiki dengan pengujian ulang dengan data yang valid dan terpercaya. Pengujian ulang dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan (pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Informasi akuntansi yang dapat dipercaya bergantung pada 3 hal, yaitu:

1. Dapat diuji, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para penguji independent dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

2. Netral, informasi harus diarahkan kepada pengguna informasi tidak melibatkan pihak-pihak lainnya.
  3. Fakta, informasi itu memang berasal dari kondisi ekonomi atau kejadian yang seharusnya terjadi.
- c) *Complete* (Lengkap)  
Dapat dikatakan lengkap bila tidak meninggalkan hal-hal penting yang melandasi aktivitas perusahaan walaupun harus mengabaikan prinsip-prinsip akuntansi selama tidak menyebabkan kekeliruan dan kesalahan dalam laporan keuangan yang mempengaruhi keputusan pengguna kualitas informasi akuntansi. Kelengkapan dalam laporan keuangan dapat diverifikasi oleh pihak eksternal atau akuntan independent (misalnya akuntan publik).
- d) *Timely* (Tepat Waktu)  
Informasi harus tersedia pada waktu yang ditentukan oleh pengambil keputusan. Informasi juga harus secepat mungkin agar dapat digunakan secara langsung untuk membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan dan menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Penggunaan aplikasi pendukung dapat membantu
- dan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu atau real-time. Dengan Anda dapat membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dapat memberikan kepercayaan yang lebih dari pimpinan perusahaan untuk memberikan kuasa lebih sesuai dengan porsi dan kemampuan Anda.
- e) *Understandable* (Dimengerti)  
Informasi akuntansi dapat dimengerti haruslah disajikan dalam format yang sesuai dengan standarisasi akuntansi perusahaan (SAP) yang berlaku di Indonesia. SAP biasanya memiliki format penyajian yang mudah dimengerti oleh pengguna kualitas informasi akuntansi. Dengan begitu laporan keuangan dapat digunakan dan menjadi bermanfaat, dan juga data dapat dijadikan sumber informasi, yang akan di gunakan untuk mengambil sebuah keputusan dalam melakukan rencana ke depan.

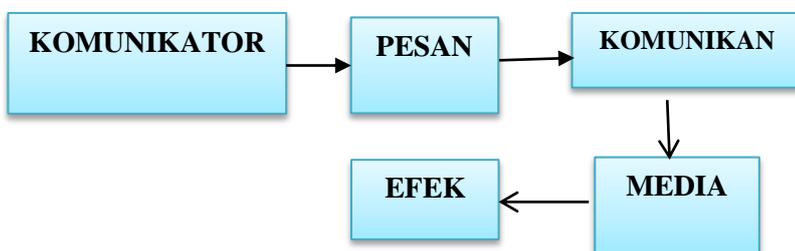
### **Media Komunikasi dan Informasi**

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, bahkan komunikasi telah menjadi suatu fenomena bagi terbentuknya suatu masyarakat atau komunitas yang terintegritasi oleh informasi, di mana masing-masing individu dalam masyarakat itu sendiri saling berbagi informasi (*information sharing*) untuk mencapai

tujuan bersama. Terjadinya komunikasi merupakan sebagai akibat dari terjadinya hubungan sosial (*Social Interaction*) baik berlangsung antar pribadi, kelompok atau massa. Pengertian Komunikasi menurut (Effendy, 2015) adalah :

“....Komunikasi adalah suatu proses penyampaian suatu pesan oleh pemberi pesan (*Komunikator*) kepada penerima pesan (*Komunikan*) untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung dengan menggunakan media/channel”

**Gambar 1.1**  
**Komponen Komunikasi**



Sumber : Onong Uchjana (2015:6)

Menurut (Effendy, 2015), Komunikasi dikatakan lengkap, apabila mengandung unsur-unsur ataupun komponen yang terdiri dari:

a. Komunikator(*Communicator*) adalah orang yang menyampaikan pesan. Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara, menulis, kelompok orang, organisasi komunikasi seperti surat kabar,

radio, televisi, film dan sebagainya. dalam komunikator menyampaikan pesan kadang-kadang komunikator dapat menjadikan komunikan sebaliknya komunikan bisa menjadi komunikator.

b. Pesan (*Message*) Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan idealnya mempunyai inti pesan (tema) sebagai pengarah dalam usaha untuk mencoba mengubah sikap dan tingka laku komunikan. Bentuk pesan dapat bersifat :

1. *Informatif* ; sifat Pesan ini memberikan keterangan-keterangan dan kemudian komunikan dapat muda mengambil kesimpulan sendiri.
2. *Persuasif* ; Pesan yang disampaikan bersifat bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang kita sampaikan akan rupa pendapat atau sikap sehingga ada perubahan. Tetapi perubahan yang terjadi itu adalah atas kehendak sendiri.

3. *Coresif* ; Memaksa dengan menggunakan sangsi-sangsi. Bentuk yang terkenal dari penyampaian secara ini adalah agitasi dengan penekanan-penekanan yang menimbulkan tekanan batin dan ketakutan diantara sesamanya dan pada kalangan public. *Coresif* dapat berbentuk perintah, intruksi, dan sejenisnya.
- c. Media (*Channel*) Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang didapat diterima melalui panca indra atau menggunakan media. Pada dasarnya komunikasi yang sering dilakukan dapat berlangsung menurut dua saluran, yaitu :
- d. Hasil (*Effect*) adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingka laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jika sikap dan tingka laku orang lain itu sesuai, maka berarti komunikasi berhasil dan demikian sebaliknya.

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Salah satu akar utama ilmu akuntansi adalah ilmu manajemen. Sebagai cikal bakal dari akar teori akuntansi terdapat berbagai teori ilmu manajemen, seperti pengorganisasian dan ilmu kepemimpinan yang mencakup teori kepemilikan entitas, teori tanggung jawab kepada seluruh

pemangku kepentingan (*enterprise theory*), dan teori keagenan (*Agency theory*). Dalam teori keagenan atau teori agensi menjelaskan relasi kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dengan manajemen perusahaan. Manajemen adalah agen yang ditunjuk oleh pemegang saham (prinsipal), dimana agen diberi tugas kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan perusahaan atas nama pemegang saham.

Teori keagenan muncul ketika pemegang saham tidak memiliki informasi yang seimbang dengan manajemen, dimana, agensi mempunyai informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang perusahaan dibandingkan pemegang saham yang dapat menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi bisa menimbulkan masalah, dimana kondisi pemegang saham yang tidak mengetahui informasi sedetail manajemen bisa dimanfaatkan oleh manajemen untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ada potensi agen menyembunyikan informasi, bahkan agen bisa saja mempengaruhi angka-angka laporan yang disajikan dan merugikan pemegang saham. Untuk menghindari hubungan yang asimetri antara manajemen dan pemilik saham, maka dibutuhkan konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang mempunyai tujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi

lebih sehat dan terbuka kepada pihak pemilik saham maupun kepada pihak eksternal perusahaan, seperti pemerintah dan juga *customer*.

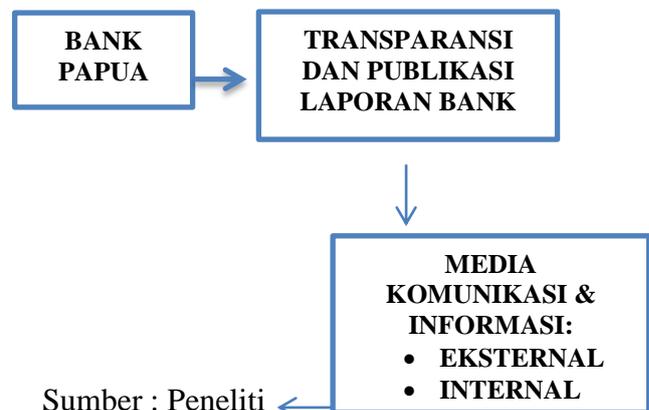
### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang transparansi dan publikasi yang dilakukan melalui laporan keuangan dan kinerja perusahaan sebagai media komunikasi dan informasi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Menurut Bodgan & Taylor (Moleong, 2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman serta mengembangkan teori. Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa menjawab pertanyaan penelitian dan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca karena dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti bukan menuliskan angka-angka melainkan berisi informasi deskriptif yang disajikan berupa kata-kata dan gambar-gambar yang dapat untuk memperjelas isi dari penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat dan

mempermudah bagi siapa saja yang membacanya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data studi dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2017) Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen berupa catatan peristiwa pada waktu yang lalu, dan dapat berupa tulisan, gambar, laporan-laporan untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data dan informasi, berupa laporan keuangan dan laporan kinerja perusahaan yang dipublikasikan perusahaan pada tahun 2009.

**Gambar 1.2**  
**Model Kerangka Pemikiran**



#### D. HASIL DAN PEMBAHSAN

Sebagai perusahaan publik, Bank Papua berkomitmen untuk menerapkan peningkatan transparansi informasi publik melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yakni Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Kemandirian dan Kewajaran sebagai dasar peningkatan kinerja Perseroan dengan secara terus menerus melakukan pemutakhiran berbagai pedoman, *standard operational procedure* (SOP), manual sesuai dengan perubahan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk peningkatan transparansi informasi kinerja perusahaan, manajemen dari waktu ke waktu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank Papua yang baik dan benar dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi untuk menjadikan Bank Papua menjadi Bank yang sehat, kuat, unggul dan terpercaya baik ditingkat Lokal, Regional dan Nasional sebagaimana yang terkandung dalam Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Papua.

Komitmen Bank Papua menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 dan juga arahan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Dalam prinsip transparansi, Bank Papua melaporkan informasi kinerja perseroan secara terbuka kepada publik melalui komunikasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keterbukaan informasi perusahaan diharuskan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan baik yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapapun. Komitmen dalam mewujudkan prinsip transparansi ditunjukkan oleh Bank Papua melalui:

1. Memiliki Divisi Sekretaris Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi perusahaan yang relevan telah tersampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan masyarakat.
2. Melalui website resmi perusahaan yang selalu diperbaharui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh Regulator.

3. Senantiasa mengedepankan keterbukaan informasi dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan (*Stakeholders*).
4. Mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
5. Senantiasa menyajikan dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.

Bank Papua menjalankan prinsip transparansi di dalam perusahaan sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Bank Indonesia (BI). Dalam memberikan informasi kepada *stakeholders* dan juga publik, bisa dikases melalui laporan tahunan (*annual reports*), laporan bulanan yang dipublikasi dengan memanfaatkan media komunikasi internal dan media komunikasi eksternal perusahaan. Berikut informasi yang disajikan oleh Bank Papua untuk publik.

**Tabel 1.2**  
**Informasi Publik di Bank Papua**

Informasi Publik	Informasi Publik
1. Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala. a. <i>Company Profile</i> b. Logo Perusahaan c. Sejarah d. Struktur Organisasi Bank Papua e. Visi, Misi f. Penghargaan g. Budaya perusahaan h. Alamat Kantor Pusat i. Daftar dan Alamat Kantor Cabang j. Profil Direksi k. Profil Dewan Komisaris l. Sekertaris Perusahaan	4. Informasi Laporan Keuangan a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) b. Laporan Laba/Rugi c. Laporan Perubahan Ekuitas d. Laporan Arus Kas e. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya f. Hasil Penilaian Oleh Auditor Eksternal
2. Informasi Yang Wajib Disediakan serta merta. a. Informasi Produk Bank Papua	5. Informasi Laporan Bank Papua a. Laporan Tahunan. b. Laporan Keuangan Auditan. c. Laporan Triwulan d. Laporan Bulanan e. Laporan Akuntan Publik
3. Informasi Yang Disediakan Setiap Saat. a. Formulir Permohonan Informasi. b. Formulir Pengajuan Keberatan. c. Keterbukaan Informasi. d. Pedoman <i>Whistle Blowing System</i> . e. Profil Lengkap Direksi. f. Profil Lengkap Dewan Komisaris. g. Profil Pemimpin Divisi. h. Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa.	

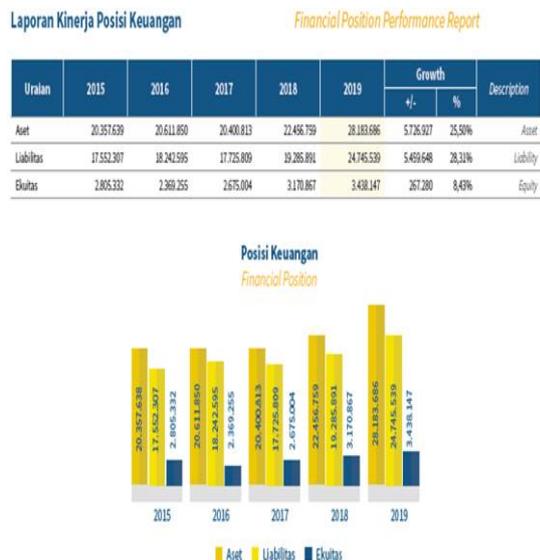
Sumber : *Annual Report*, Bank Papua

Manajemen menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan, baik laporan tahunan, triwulan, bulanan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Laporan keuangan disajikan dalam bahasa Indoensia yang baik dan benar serta dalam bahasa Inggris yang dicetak dengan kualitas yang baik. Standar laporan keuangan yang digunakan adalah mudah dipahami (*understandability*), relevan (*relevant*), Keandalan (*reliability*) serta daya banding (*comparability*).

a. *Relevant* (Relevan)

Faktor ini sangat dikaitkan dengan informasi akuntansi harus bisa bermanfaat secara langsung bagi pengguna informasi akutansinya. Dikarenakan informasi ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk membuat perencanaan, perkiraan di masa yang akan datang dan evaluasi terhadap kualitas informasi akuntansi di masa lalu. Selain itu dapat memberikan pemahaman yang baru terhadap pengguna kualitas informasi akuntansi sehingga laporan yang hanya bersifat sementara, dan selanjutnya tidak relevan harus dihentikan pembuatannya. Kualitas informasi akuntansi harus memiliki karakteristik yang relevan, akurat dan tepat waktu.

**Gambar 1.3**  
**Laporan Posisi Keuangan Bank Papua**  
**Tahun 2019**



b. *Reliable* (Terpercaya)

Manajemen bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indoensia. Manajemen menunjuk Auditor Independen, yaitu Hertanto, Grace, Karunawan (SGK) sebagai auditor independen untuk mengaudit laporan keuangan perseroan sebelum dipublikasikan kepada pemangku kepentingan. Dengan adanya auditor independen, merupakan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab manajemen kepada para pemangku kepentingan dalam menyajikan laporan keuangan yang terpercaya.

**Gambar 1.4**  
**Laporan Auditor Independen**



Sumber : Bank Papua

c. *Complete* (Lengkap)

Informasi laporan keuangan Bank Papua, memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia yang meliputi :

- a) Laporan posisi keuangan.
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- c) Laporan perubahan ekuitas.
- d) Laporan arus kas.
- e) Catatan atas laporan keuangan.
- f) Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya.

**Gambar 1.5**  
**Informasi Laporan Keuangan**

VII Informasi Keuangan (Financial Information)	
4. Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:
4. Complete financial statement	a. Laporan posisi keuangan; b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; c. Laporan perubahan ekuitas; d. Laporan arus kas; e. Catatan atas laporan keuangan; f. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan g. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).

1. Informasi perbandingan tingkat profitabilitas : Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
2. Informasi laporan arus kas : Memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan.

b) Penggunaan metode langsung (*direct method*) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi.

- c) Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- d) Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Informasi Ikhtisar Kebijakan Akuntansi, meliputi:

- a) Pernyataan kepatuhan terhadap SAK
- b) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan
- c) Pengakuan pendapatan dan beban
- d) Imbalan kerja
- e) Instrumen Keuangan.

4. Informasi yang berhubungan dengan perpajakan, meliputi :

- a) Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini
- b) Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi
- c) Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

- d) Rincian Asset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah Asset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan
  - e) Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.
5. Informasi yang berhubungan dengan asset tetap :
- a) Metode penyusutan yang digunakan
  - b) Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya.
  - c) Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar Asset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar Asset tetap (untuk model biaya).
  - d) Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan Asset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.
6. Informasi yang berhubungan dengan segmen operasi :
- a) Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan.
  - b) Informasi tentang laba rugi, Asset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan
  - c) Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, Asset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas.
  - d) Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.
7. Informasi yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan :
- a) Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya
  - b) Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan.

- c) Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas
  - d) Kebijakan manajemen risiko
  - e) Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.
8. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain:
- a) Penjualan/pendapatan usaha
  - b) Laba (rugi) : distribusikan kepada pemilik entitas induk dan distribusikan kepada kepentingan non-pengendali.
  - c) Penghasilan komprehensif periode berjalan : Distribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali
  - d) Laba (rugi) per saham.
9. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain:
- a) Jumlah investasi pada entitas asosiasi.
  - b) Jumlah Asset
  - c) Jumlah liabilitas
  - d) Jumlah ekuitas
10. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Informasi memuat :
- a) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.
  - b) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.
  - c) Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan
  - d) Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.
  - e) Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.
11. Informasi rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan sesuai dengan industri perusahaan.

12. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Informasi memuat antara lain :

- Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*)
- Tingkat bunga/imbalan.
- Tanggal jatuh tempo.
- Peringkat obligasi/sukuk.

13. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain:

- Penjualan/pendapatan usaha
- Laba (rugi) : distribusikan kepada pemilik entitas induk dan distribusikan kepada kepentingan non-pengendali.
- Penghasilan komprehensif periode berjalan : Distribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali
- Laba (rugi) per saham.

d. *Comparability* (Dapat dibandingkan)  
 Dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan merujuk pada standar akuntansi keuangan di Indonesia, dimana laporan keuangan yang disusun dibuat

pembandng dengan periode sebelumnya dengan tujuan agar pengguna laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja perusahaan.

**Gambar 1.6**  
**Laporan Posisi keuangan tahun 2019 dan 2015-2018 (Pembanding)**

**Ikhtisar Data Keuangan Tahun 2019**

*Financial Data Highlight in 2019*

Posisi Keuangan		Financial Position				
		dalam jutaan (in millions) Rp				
DATA KEUANGAN	2019	2018	2017	2016	2015	FINANCIAL DATA
ASET	28.183.686	22.456.759	20.400.813	20.611.850	20.357.639	ASSET
DPK NON BANK	22.844.582	17.929.809	16.563.805	16.478.663	15.787.213	NON BANK PPF
1. Giro	11.086.817	8.151.733	7.641.893	7.033.795	7.251.987	1. Current Account
2. Tabungan	8.804.223	7.361.170	6.572.270	6.287.064	5.877.399	2. Savings
3. Deposito	2.953.543	2.416.906	2.349.642	3.157.804	2.657.827	3. Time Deposits
DPK BANK	115.906	64.007	91.770	90.817	119.151	BANK PPF
1. Giro	46.754	54.715	89.793	84.250	116.561	1. Current Account
2. Tabungan	6.346	4.342	1.727	5.117	1.389	2. Savings
3. Deposito	62.806	5.950	250	1.450	1.250	3. Time Deposits

Sumber : Bank Papua

Kemudian perusahaan juga menginformasikan Posisi Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan kepada para *stakeholders*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan publik yang dipublis oleh perusahaan di media Cetak Nasional, seperti Harian Cenderawasih Pos dan diunggah pada sistem Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan.

**Gambar 1.7**  
**Laporan Keuangan Bulanan Bank Papua**

Cenderawasih Pos, Kamis, 23 April 2020

LAPORAN KEUANGAN			
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA			
JL. AMBAZI TANJ. NO. 5 JALANPORA MIFYI PAPUA, KOTAM. POS 1001, TEL: 9697-92221 (PABUKING)			
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN		LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN	
PERIODE 01 JANUARI 2020 SAMPAI 31 MARET 2020		PERIODE 01 JANUARI 2020 SAMPAI 31 MARET 2020	
NO	URAIAN	31 MARET 2020	31 MARET 2019
<b>1. PENGHASILAN DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN</b>			
1	Penghasilan dari Bank-Bank	447.855	442.895
2	Penghasilan dari Bank-Bank	447.855	442.895
3	Penghasilan dari Bank-Bank	113.725	65.645
4	Penghasilan dari Bank-Bank	113.725	65.645
5	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
6	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
7	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
8	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
9	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
10	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
11	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
12	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
13	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
14	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
15	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
16	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
17	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
18	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
19	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
20	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
21	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
22	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
23	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
24	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
25	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
26	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
27	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
28	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
29	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
30	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
31	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
32	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
33	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
34	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
35	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
36	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
37	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
38	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
39	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
40	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
41	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
42	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
43	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
44	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
45	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
46	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
47	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
48	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
49	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
50	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
51	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
52	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
53	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
54	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
55	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
56	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
57	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
58	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
59	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
60	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
61	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
62	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
63	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
64	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
65	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
66	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
67	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
68	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
69	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
70	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
71	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
72	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
73	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
74	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
75	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
76	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
77	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
78	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
79	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
80	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
81	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
82	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
83	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
84	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
85	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
86	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
87	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
88	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
89	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
90	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
91	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
92	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
93	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
94	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
95	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
96	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
97	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
98	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
99	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035
100	Penghasilan dari Bank-Bank	377.095	372.035

Sumber : (Cenderawasih Pos, 2019)

**Media Komunikasi dan Informasi untuk publikasi**

Dalam melakukan publikasi laporan keuangan sesuai dengan peraturan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) Nomor.37/POJK.03/2019 tentang transparansi dan publikasi Laporan Bank dan kinerja perusahaan kepada *stakeholders* dan juga publik, perseroan memanfaatkan media komunikasi internal dan media komunikasi eksternal sebagai media informasi kepada publik. Sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator agar perseroan menyusun dan menyajikan informasi serta mempublikasikan laporan keuangan dengan kualitas yang baik, tepat waktu, akurat, jelas, dan obyektif dengan memanfaatkan media komunikasi internal dan eksternal perusahaan.

**Tabel 1.3**  
**Media Komunikasi dan Informasi**

Komponen Komunikasi	Informasi
a. Komunikator ( <i>Sender</i> )	Manajemen Bank Papua
b. Pesan ( <i>Message</i> )	a. Informasi Laporan Keuangan Bulanan b. Informasi Laporan Triwulan c. Informasi Laporan RUPS d. Informasi Laporan Tahunan e. Informasi Perusahaan
c. Media ( <i>Channel</i> )	a. Internal : <i>Corporate Website, Press Release, RUPS, E-mail, Media Sosial</i> Perusahaan b. Eksternal : <i>Media Cetak Nasioanl, Elektronik</i>
d. Komunikan ( <i>Receiver</i> )	a. Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholders</i> ) b. Investor. c. Kreditor. d. Otoritas Pajak. e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). f. Bank Indonesia (BI) g. Customer. h. Karyawan.
e. Dampak ( <i>Effect</i> )	a. Citra Positif Korporat. b. <i>Good Corporate Governance</i> . c. Keterbukaan Informasi Publik.

Sumber : Bank Papua

## PEMBAHASAN

Penyelenggaraan operasional bisnis Bank Papua dilandasi dengan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), risiko manajemen dan juga kepatuhan kepada perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan melakukan identifikasi, pengukuran dan mitigasi pada setiap aktifitas bank. Yakni dengan melakukan kajian atas setiap aktifitas fungsional (kajian inisiatif) berdasarkan atas kejadian/fakta-fakta dalam kurun waktu tertentu serta merekomendasikan pengendalian dalam rangka perbaikan/ pemulihan dari hal-hal yang merugikan bank. Bank Papua juga memastikan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi : Monitoring dan Pemantauan.

Dalam menilai kinerja dan laporan keuangan perusahaan, Pemegang saham, dewan komisaris dan direksi melakukan audit dengan menunjuk auditor independen terhadap laporan yang disusun dan disajikan oleh agen (manajemen). Pemeriksaan ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang berkualitas tanpa ada penyimpangan-penyimpangan. Audit juga berguna bagi pihak manajemen perusahaan dengan tujuan mendapat legitimasi sudah bekerja berdasarkan standar an prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Laporan keuangan yang tepat waktu akan mengurangi terjadinya asimetri informasi

Tanggung jawab perseroan dalam memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan sesuai dengan teori keagenan, dimana manajemen (agen) senantiasa mematuhi undang-undang dan peraturan terkait serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan diterapkan pada setiap aspek bisnis. Keterbukaan informasi publik yang dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah transparansi (*transparency*), dimana manajemen memberikan informasi yang akurat terkait dengan kinerja perusahaan dengan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan memanfaatkan media komunikasi internal perusahaan seperti dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Siaran Pers dan juga media komunikasi eksternal seperti Harian Cenderawasih Pos dan Majalah Perbankan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Bank Papua telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Bank dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholders), serta meningkatkan kepatuhan terhadap pertauran perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Implementasi transparansi dan publikasi yang berkelanjutan telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja Bank Papua. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pencapaian Bank Papua sepanjang tahun 2019 yang berhasil mencapai kinerja yang baik dari sisi keuangan dan, keterbukaan informasi. Praktik transparansi dari pihak manajemen dan stakeholders diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan citra Perusahaan kepada publik luas dalam jangka panjang sehingga trust kepada perseroan akan terus terjaga. Dalam era digital Bank Papua memanfaatkan media komunikasi untuk berkomunikasi kepada publik di antaranya melalui media cetak (Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos), media elektronik dan *cyber media* (Website Perusahaan, Instagram, Facebook, Media Sosial lainnya.

Tanggung jawab perseroan dalam memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan senantiasa mematuhi undang-undang dan peraturan terkait serta memastikan bahwa tata kelola perusahaan diterapkan pada setiap aspek bisnis. Keterbukaan informasi publik yang dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*). salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah transparansi (*transparency*), dimana manajemen memberikan informasi yang akurat terkait dengan kinerja perusahaan dengan mempublikasikan laporan keuangan perusahaan secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan memanfaatkan media komunikasi internal perusahaan seperti dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), Siaran Pers dan juga media komunikasi eksternal seperti Harian Cenderawasih Pos dan Majalah Perbankan.

## DAFTAR REFERENSI

- Cenderawasih Pos. (2019). *Laporan Keuangan Triwulan*. 3.
- Effendy, O. U. (2015). *Dinamika Komunikasi*. Remaja Rosda Karya.
- Finel, B. I., & Lord, K. M. (1999). The surprising logic of transparency. *International Studies Quarterly*, 43(2), 315–339.
- Garsten, C., & De Montoya, M. L. (2008). *Transparency in a new global order: Unveiling organizational visions*. Edward Elgar Publishing.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif, Terj. In *Uhar Suharsaputra*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. (2010). *Akuntansi Biaya*. Refika Aditama.
- Oltmann, S. M. (2009). Information access: Toward a more robust conceptualization. *Proceedings of the American Society for Information Science and Technology*, 46(1), 1–17.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Transparansi Laporan Bank*. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Pasquier, M., & Villeneuve, J.-P. (2007). Organizational barriers to transparency: A typology and analysis of organizational behaviour tending to prevent or restrict access to information. *International Review of Administrative Sciences*, 73(1), 147–162.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.